

Jurnalisme Islam-Profesional dalam Pusaran Politik Identitas: Studi Kasus pada Harian *Duta Masyarakat* & *Harian Bangsa*

Dhimam Abror Djuraid¹
d.abror@yahoo.com

Abstract: The 2019 presidential election was considered as an arena for identity-based-politics competition between *abangan*-moderate Islamic groups versus formal-conservative Islamic groups. The mass media which should be neutral and objective, are trapped in the political arena of identity politics, including *Harian Duta Masyarakat* and *Harian Bangsa*. This study reviews in-depth how *Harian Duta Masyarakat* and *Harian Bangsa* interpret professional journalism and Islamic journalism amid political support for the presidential election, 2019. With qualitative-descriptive methods, this study found that *Harian Duta Masyarakat* openly supported Prabowo Sandi, while the *Harian Bangsa* was a strong supporter of Joko Widodo-Makruf Amien. Both media justified that those decisions were made through professional and ideological reasons.

Abstrak: Pemilihan presiden 2019 disebut sebagai ajang persaingan politik identitas antara kelompok Islam *abangan*-moderat versus kelompok Islam formal-konservatif. Keterbelahan dukungan politik tersebut memengaruhi sikap media massa. Media massa yang seharusnya netral dan objektif, terjebak dalam permainan politik identitas, diantaranya adalah *Harian Duta* dan *Harian Bangsa*. Studi ini mengulas secara mendalam bagaimana *Harian Duta* dan *Harian Bangsa* memaknai jurnalisme profesional dan jurnalisme Islam di tengah keterbelahan dukungan politik pada Pilpres 2019. Dengan metode kualitatif-deskriptif, studi ini menemukan bahwa secara terbuka *Harian Duta Masyarakat* mendukung Prabowo Sandi, sementara *Harian Bangsa* pendukung kuat Joko Widodo-Makruf Amien. Kedua media itu menjustifikasi pilihan tersebut dilakukan dengan alasan-alasan profesional dan ideologis.

Kata Kunci: Politik identitas, dukungan politik, media Islam, jurnalisme profesional

¹ Dosen Stikosa AWS Surabaya

Pendahuluan

Pemilihan presiden (Pipres) 2019 dianggap sebagai kontestasi politik yang sarat dengan pertarungan politik identitas antara kubu Islam nominal yang lebih moderat versus Islam konservatif yang lebih formalistik (Qodari, 2019). Dua pasang kandidat yang bertarung dalam kontestasi ini dianggap sebagai representasi dua kubu identitas. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amien dianggap sebagai representasi kalangan Islam moderat (yang berkoalisi dengan kelompok nasionalis dan liberal), sementara pasangan Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno dianggap lebih dekat dengan kalangan Islam konservatif (Bayu, 2019).

Kelompok Islam pertama diasosiasikan dengan Nahdhatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mengklaim mempunyai anggota 40 juta orang (Siradj, 2019). NU mengusung konsep Islam Nusantara yang lebih moderat, akomodatif, dan eklektik, yang banyak disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia. Islam Nusantara lebih akomodatif terhadap kelompok Islam nominal yang tidak menjalankan syariat Islam secara penuh. Kelompok ini lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi budaya Hindu, sehingga cara beragama mereka lebih campur-baur antara Islam dan mistisisme Hindu (Shihab, 2001).

Kelompok kedua yang lebih konservatif merupakan antitesa dari kelompok sinkretis. Pada abad ke-18 muncul kelompok-kelompok pembaru Islam di Timur Tengah sebagai jawaban terhadap kemerosotan pengamalan Islam yang dianggap menyimpang dari ajaran Muhammad Saw. Pemikiran-pemikiran kelompok pembaru yang dimotori oleh Jamaludin Al-Afghani ini pengaruhnya terasa sampai ke Indonesia, dengan munculnya tokoh-tokoh pembaru seperti K.H Ahmad Dahlan yang kemudian melahirkan Persyarikatan Muhammadiyah pada 1912 (Latif, 2005).

Para pembaru ini melakukan gerakan pemurnian akidah melalui gerakan pendidikan dan pencerahan dan banyak mendapatkan pengaruhnya di daerah perkotaan dan di kalangan intelijensia muslim kelas menengah (Latif, 2005). Pengalaman keberagaman di Indonesia menjadi terpolarisasi ke dalam dua kutub tradisional dan modernis.

Kalangan tradisional yang lebih besar jumlahnya mendapatkan wadah organisasi dengan lahirnya Nahdhatul Ulama (NU) pada 1926.

Geertz (1964) membagi keberagaman Islam masyarakat Jawa menjadi trikotomi; santri, priyayi, dan abangan. Santri adalah kelompok yang menjalankan agama sesuai syariah Islam dan mempunyai akidah yang lebih murni. Mereka kebanyakan tinggal di pesisir atau perkotaan kelas menengah dengan profesi sebagai saudagar. Priyayi adalah kalangan kelas menengah *ambtenaar* yang bekerja sebagai birokrat pada penguasa Belanda. Mereka lebih modern dalam gaya hidup dan gaya berpikir, dan dalam menjalankan agama mereka lebih longgar. Abangan adalah kalangan yang tinggal di pedesaan yang menjalankan Islam secara eklektik, campur-baur dengan tradisi Hindu dan Budha, kelompok ini jumlahnya lebih besar dari dua kelompok lainnya.

Teori ini juga menjadi dasar bagi munculnya teori politik identitas. Secara umum politik identitas adalah tindakan politik yang diambil berdasarkan identitas agama, budaya, suku, ras, dan sejenisnya, dan mengabaikan pertimbangan rasional (Qodari, 2019). Menurut Latif (2011), dikotomi politik identitas sudah terlihat jelas gejalanya pada masa-masa persiapan kemerdekaan ketika para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan kemudian PPUPKI (Panitia Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bersidang mempersiapkan kemerdekaan dan mempersiapkan dasar negara bagi negara baru yang akan lahir.

Pada perdebatan dasar negara itulah muncul kekuatan kelompok Islam yang menghendaki syariah Islam diterapkan secara formal melalui konstitusi. Para pemikir, seperti Muhammad Yamin, Supomo, Sukarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan beberapa tokoh lain sepakat memakai rumusan Pancasila yang digagas Sukarno sebagai dasar negara. Perdebatan muncul karena kalangan Islam menghendaki formalisasi agama dengan menambahkan tujuh “Disertai Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam bagi Pemeluknya” yang dikenal sebagai “Piagam Jakarta” (Simanjuntak, 1994).

Sampai dengan pilpres 2019 yang lalu, politik identitas masih tetap mewarnai. Hal itu ditandai dengan munculnya isu-isu keagamaan

dalam narasi kampanye kedua belah paslon. Isu-isu mengenai khilafah, negara Islam, penerapan syariah dilontarkan ke kubu Prabowo-Sandi. Sementara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amien dianggap memainkan politik aliran dengan terang-terangan merekrut Ma'ruf Amien, ketua Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Syuriah NU, sebagai calon wakil presiden (Maliki, 2019).

Lebih dari itu, pada pilpres 2019 lalu beberapa media juga terjebak dalam permainan politik identitas ini. Sebagaimana kekuatan masyarakat yang terpolarisasi menjadi dua, media pun terbelah antara mendukung pasangan calon 01 (Jokowi-Ma'ruf) dan pasangan 02 (Prabowo-Sandi). Media-media *mainstream* yang menjadi bagian dari konglomerasi media dituduh berada di belakang pasangan Jokowi-Ma'ruf, karena alasan-alasan politik maupun ekonomi. Hary Tanoe-soedibjo, pemilik konglomerasi media MNC group adalah pendiri Partai Perindo pendukung Jokowi. Surya Paloh, pemilik Media Group adalah pendiri Partai Nasdem, pendukung Jokowi. Chaerul Tanjung pemilik Trans-Corp juga memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan (Bhaskara, 2018). Sinyalemen Golding dan Murdoch (2001) bahwa media konglomerasi cenderung mengorbankan idealisme jurnalistik untuk kepentingan politik-ekonomi terlihat pada pilpres 2019 ini.

Studi ini tertarik untuk membahas secara mendalam bagaimana makna jurnalisme profesional dan jurnalisme Islam di tengah keterbelahan dukungan politik serta penguatnya politik identitas pada Pilpres 2019 pada dua media massa Islam di Surabaya, yakni Duta Masyarakat dan Harian Bangsa.

Media Massa Islam

Media, tak pelak, memainkan peran sangat krusial dalam perkembangan politik tahun ini. Media-media *mainstream* berlomba-lomba memberitakan Pemilihan presiden (Pilpres) sejak masa-masa awal persiapan, masa-masa kampanye, sampai masa pemilihan presiden. Muncul beberapa kekecewaan terhadap media *mainstream* nasional yang dianggap tidak netral dalam meliput pilpres, dan dianggap terlalu condong pada pasangan calon (Paslon) petahana Jokowi-Ma'ruf Amien.

Media seharusnya netral, objektif, dan tidak memihak (McQuail, 1987). Peran media untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengharuskannya untuk objektif, akurat, dan independen. Tanggung jawab utama media adalah kepada warga (Kovach-Rosentiel, 2006). Dalam praktiknya beberapa media tidak menjalankan fungsi sosial itu dengan baik, mereka terjebak dalam pemihakan kepada salah satu pihak sehingga mengabaikan prinsip keberimbangan (*balance*). Kecondongan yang berlebihan terhadap kepentingan bisnis seringkali menyebabkan media melakukan komodifikasi terhadap berita, dengan mendapatkan imbalan finansial dalam bentuk iklan atau lainnya. Hal itu terjadi karena media menjadi bagian dari konglomerasi vertikal dan horizontal, sehingga kepentingan idealisme bertabrakan dengan kepentingan bisnis-ekonomi (Mosco, 2002).

Kebebasan pers di Indonesia yang didapat dari hasil reformasi 1998 melahirkan media-media yang berafiliasi dengan Islam. Surjomiharjo (1980) yang menelusuri sejarah pers nasional mengungkapkan bahwa pada era Orde Lama, media-media partisan bermunculan menjadi corong partai politik. Hampir semua partai politik mempunyai surat kabar masing-masing.

Pada era Orde Baru, media dikendalikan dengan ketat dan dipaksa menjalankan peran sebagai pers bebas bertanggung jawab. Kritik terhadap kekuasaan tidak ditoleransi dan bisa sewaktu-waktu dijatuhi sanksi oleh pemerintah dengan pencabutan izin terbit SIUPP (Surat Izin Penerbitan Usaha Penerbitan Pers) (Oetama, 2001).

Reformasi 1998 menghasilkan pers yang bebas. Izin penerbitan tidak diperlukan lagi, dan kritik terhadap kekuasaan bisa dilakukan sebebaskan-bebasnya. Media-media partisan yang selama Orde Baru tidak bisa muncul, sekarang bermunculan kembali. Tetapi, sebagaimana disinyalir oleh Siregar (1995) media partisan berdasar agama tidak bisa bertumbuh besar. Kendati demikian, media dengan genre partisan masih tetap bermunculan, sebagian bisa bertahan, dan sebagian lain hidup dengan kembang kempis.

Steele (2018) melakukan studi mendalam untuk melihat bagaimana media-media Islam beroperasi di Indonesia. Ia meneliti tiga “media Islam”, Majalah *Sabili*, Harian *Republika*, dan Majalah *Tempo*.

Nama terakhir ini tentu tidak pernah diasosiasikan sebagai media Islam. Tetapi, Steele mempunyai alasan tersendiri untuk memasukan *Tempo* dalam kelompok ini. Steele melihat bahwa meskipun *Tempo* adalah media sekular, tetapi majalah itu memperjuangkan apa yang oleh Steele disebut sebagai nilai-nilai Islam Kosmopolitan, yaitu Islam moderat dan berperspektif plural dengan gagasan liberal progresif. Pandangan Steele bahwa *Tempo* termasuk dalam kategori pengusung semangat Islam Kosmopolitan tidak disetujui oleh pemimpin redaksi *Tempo* Arif Zulkifli, tapi Steele kukuh dengan pendiriannya.

Elemen Dasar Jurnalistik dan Jurnalisme Profetik

Goenawan Mohamad (2001) menyebutkan bahwa jurnalisme adalah sebuah “laku moral”. Laku yang dimaksud Mohammad adalah laku spritual dalam konsep Jawa, dimana seseorang menahan diri, menahan nafsu, untuk tidak melakukan sesuatu kesenangan ragawi untuk mendapatkan sebuah capaian spritual. Jurnalisme, dalam konteks ini, adalah sebuah laku moral untuk menjalankan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tahu mengenai berbagai informasi (*to fulfill people's right to know*). Dalam memenuhi kewajiban itu jurnalisme juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan supaya tidak terjadi penyelewengan (*abuse of power*) (McQuail, 1987).

Kewajiban dan tanggung jawab utama seorang jurnalis semata-mata hanyalah kepada publik (Kovach, 2008), bukan kepada pemilik modal atau kepada negara sekali pun. Kovach dan Rosentiel (2001) merumuskan sembilan elemen jurnalisme yang menjadi pegangan jurnalis profesional dalam menjalankan tugasnya. Kesembilan elemen tersebut adalah:

1. *Kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran:*
Tugas dan kewajiban utama jurnalis adalah “*fulfilling people's right to know*” memenuhi hak rakyat untuk mengetahui (kebenaran) sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat.
2. *Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citizens)*
Media dituntut untuk melayani berbagai kepentingan *stakeholder* dan *shareholder*. Namun, kesetiaan utama jurnalisme harus diberi-

kan kepada warga negara (*citizens*). Kesetiaan pada warga inilah esensi dari independensi jurnalistik.

3. *Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi*

Pembeda utama jurnalisme dari berita hiburan (*infotainment*), propaganda, dan fiksi adalah disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik mencari narasumber primer yang menyaksikan peristiwa, mewawancarai sebanyak mungkin narasumber, dan meminta sebanyak mungkin komentar dari berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan dan ketidakberpihakan.

4. *Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput*

Wartawan harus menjaga independensi semangat dan pikirannya karena ia bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi, independensi lebih diutamakan daripada netralitas. Kredibilitas sang jurnalis terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, dan kepentingan publik yang lebih besar.

5. *Jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan*

Jurnalis adalah anjing penjaga (*watchdog*) terhadap kekuasaan. Jurnalis bukan sekadar mengawasi kekuasaan pemerintahan tapi semua kekuatan yang ada di masyarakat. Jurnalis harus mengawasi para pemilik kekuasaan supaya tidak melakukan penyelewengan kekuasaannya.

6. *Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik*

Jurnalisme menyediakan ruang publik (*public sphere*) agar masyarakat bisa melihat masalah-masalah yang benar penting, sehingga mendorong masyarakat membuat penilaian dan mengambil sikap atas berbagai isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

7. *Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan*

Seringkali jurnalisme tidak mengangkat isu-isu penting karena alasan tidak menarik. Tugas jurnalislah menjadikan isu penting menjadi menarik dan relevan untuk disajikan kepada khalayak.

8. *Jurnal* harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Kerja jurnalisisme seperti pembuat peta untuk memandu masyarakat supaya bisa mencapai tujuan. Berita yang dibuatnya proporsional dan komprehensif. Untuk itu diperlukan akurasi dan objektivitas.
9. *Jurnal* memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Jurnal bekerja dengan panduan kode etik sebagai tanggung jawab personal sekaligus menjadi panduan moral. Jurnal mempunyai tanggung jawab untuk menyuarakan nurani mereka sesuai dengan nurani publik.

Elemen dasar jurnalistik yang dikemukakan Kovach tersebut dalam pandangan Islam tidaklah bertentangan. Tugas mendasar seorang jurnalis muslim dalam menjalankan tugas jurnalistik adalah sebagai panggilan tugas kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam yaitu "*Amar Makruf Nahi Munkar*" (memerintahkan kebajikan dan mencegah keburukan) (Hadi, 2014).

Jurnal muslim Indonesia Parni Hadi, salah satu pendiri *Republika*, dan pemimpin redaksi, memperkenalkan terminologi "Jurnalisme Profetik" dan menerbitkan buku "Jurnalisme Profetik" pada 2014. Menjadi wartawan sebagai ibadah. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris *prophetic*. Artinya adalah kenabian. Karena itu, jurnalisme profetik adalah jurnalisme kenabian yang meneladani akhlak dan perilaku mulia para nabi dan rasul.

Jurnalisme profetik adalah proses mencari, mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan dan menyiarkannya dalam bentuk informasi dengan melibatkan olah fisik, intelektual dan spiritual sejak awal untuk melayani publik dengan penuh cinta tanpa memandang suku, ras, budaya, agama dan ideologi.

Namun hal berbeda terjadi pada Pilpres 2019. Dalam Pilpres 2019 menjadi ajang paling terbuka bagi pertarungan politik identitas (Qodari, 2019). Narasi-narasi yang dibangun kedua paslon sarat dengan narasi identitas. Kubu Jokowi-Ma'ruf dituduh anti-Islam, terutama Islam garis keras. Sementara kubu Prabowo-Sandi dituduh mendukung sistem khilafah yang dianggap anti-Pancasila. Begitu tajam narasi

politik identitas dalam pilpres 2019, sampai dikhawatirkan terjadi konflik di akar rumput (Denny, J.A, 2019).

Media-media *mainstream* yang dimiliki para konglomerat, seperti Harry Tanoesoedibjo (MNC Group), Surya Paloh (Media Group), Jakob Oetama (Kompas Group), Chaerul Tanjung (Trans dan Para Group), Eddy Sariatmaja (Emtek), Ciputra (Grafitti dan Jawa Pos Group), ikut dalam arus ini dan dianggap tidak menjaga netralitas (Arif, 2019). Media konglomerasi tersebut dianggap lebih pro 01 karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi-politik yang bersifat pragmatis (Mosco, 2001).

Beberapa media lainnya memilih sikap lain dengan memihak ke pasangan 02. Narasi-narasi identitas seperti tuduhan PKI terhadap Joko Widodo dan keraguan terhadap keislaman Prabowo, menjadi narasi utama dalam pemberitaan media-media tersebut. Selain itu, isu-isu identitas yang mendominasi narasi media pro 01 adalah isu khilafah, isu anti-Pancasila, anti-NKRI, dan anti-kebhinnekaan. Sementara dari kubu 02 narasi identitas yang mendominasi adalah ancaman PKI, dominasi Cina, dan gerakan liberal seperti LGBT.

Di Surabaya juga terdapat dua media berbasis Islam. Harian *Bangsa*, yang merupakan grup *Jawa Pos*, menyasar pembaca Islam tradisional dari NU dengan pendekatan jurnalisme dakwah. Demikian pula dengan Harian *Duta* yang juga menyasar segmen NU dengan pendekatan jurnalisme yang kurang leih sama. Dua surat kabar yang mulanya sama-sama berinduk ke *Jawa Pos* ini berpisah jalan dan kemudian menempuh kebijakan redaksional yang sangat berbeda dalam pilpres 2019 ini.

Studi ini memakai metode kualitatif-diskriptif dalam tradisi penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena media, Islam, dan

Metodologi

politik identitas (Mulyana, 2010, Sugiono, 2001, Mo-leong, 2007, Denzin dan Lincoln, 2007). Topik ini sangat luas dan berdimensi rumit sehingga membutuhkan pendalaman dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*depth interview*), observasi langsung (*direct observation*) dan partisipasi langsung dalam rapat-rapat redaksi media. Teknik pengumpulan data *grounded-research* ini memperkaya dimensi penelitian ini.

Pendekatan studi kasus (Yin, 2007 dan Alwasilah, 2008, Creswell, 2007), dilakukan dengan memperbandingkan secara langsung dua media Harian *Bangsa* dan Harian *Duta* dalam kebijakan redaksional dalam Pilpres 2019. Selama 25 tahun menjadi praktisi media, peneliti mempunyai akses yang luas terhadap berbagai kalangan media di Surabaya dan seluruh Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti bisa mendapat akses yang luas terhadap dua media tersebut. Peneliti bisa mewawancarai awak redaksi, redaktur, dan pemimpin redaksi dua media itu secara sangat terbuka. Peneliti juga mengikuti berbagai rapat penting maupun rutin yang diselenggarakan oleh media-media itu. Peneliti juga bisa melakukan observasi langsung di kantor redaksi (*news-room*) untuk melihat bagaimana pengambilan keputusan dilakukan.

Dengan melakukan pengamatan dan analisis terhadap beberapa edisi pada masa-masa persiapan dan pelaksanaan pilpres 2019, peneliti bisa mengambil kesimpulan yang cukup komprehensif mengenai arah kebijakan redaksional media tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Jurnalisme Profesional dan Politik Identitas: Analisis Harian Duta Masyarakat

Harian Duta Masyarakat,² yang sekarang berkantor di Surabaya, adalah reinkarnasi dari Harian Duta Masyarakat

² Lebih lanjut akan ditulis dengan kata Duta

pada era Orde Lama. *Duta* terbit perdana pada 2 Januari 1954 dengan pemimpin redaksi Asa Bafagih, seorang wartawan senior yang berpengalaman, seangkatan dengan Adam Malik, Sumanang, dan Suardi Tasrif (Salim, 2012).

Duta lahir dari gerakan NU yang saat itu bergabung dalam koalisi Partai Masyumi. Pada pemilu demokratis pertama 1955 Masjumi menduduki tempat kedua di bawah PNI (Partai Nasionalis Indonesia). Tetapi, kemudian muncul friksi di internal koalisi Masjumi dan NU kemudian keluar dari koalisi. NU kemudian mengambil jalan politiknya sendiri. *Harian Duta* dijadikan sebagai ujung tombak komunikasi politik untuk menyampaikan gagasan politik NU.

Wartawan-wartawan berpengalaman seperti Mahbub Djunaedi dan Said Budaery juga bergabung dengan *Duta*, sehingga menjadikan koran ini berpengaruh dan analisisnya banyak ditunggu. Pada 1971 *Duta* dikenai breidel dan tidak diperbolehkan terbit lagi (Salim, 2012).

Selama masa Orde Baru *Duta* tidak pernah terbit lagi. Baru setelah Orde Baru berakhir pada 1998 muncul gagasan untuk menghidupkan kembali *Duta Masyarakat*. Beberapa aktivis NU ketika itu menghubungi Dahlan Iskan, bos Jawa Pos Group, menyampaikan ide untuk menghidupkan kembali *Duta*. Gayung bersambut, Dahlan setuju menghidupkan kembali *Duta* di bawah kelompok Jawa Pos Group.

Arif Afandi menjadi pemimpin redaksi *Duta* didampingi Saifulah Yusuf, ketua GP Ansor ketika itu, sebagai pemimpin umum. Beberapa penulis NU senior bergabung dalam dewan redaksi *Duta*, termasuk budayawan Mustofa Bisri. Tulisan Mustofa Bisri dalam bentuk kolom hadir rutin di *Harian Duta*.

Arif Afandi mengatakan, meskipun seratus persen digawangi oleh aktivis dan tokoh NU, tetapi *Duta* bukanlah surat kabar Islam. *Duta* lebih sebagai harian umum, sama dengan harian lainnya, tetapi tetap menjadi ujung tombak komunikasi politik NU. Rubrikasi *Duta* banyak mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi Afandi menegaskan bahwa *Duta* bukanlah media Islam (Afandi, wawancara, Oktober 2019).

Bulan madu selalu berlangsung singkat. Tiga tahun terbit tidak menunjukkan performa bisnis yang menjanjikan, *Duta* berada dalam kesulitan. Berada dalam sebuah grup konglomerasi media seperti Jawa

Pos menjadikan Duta berada di bawah tekanan karena tidak bisa memenuhi target bisnis. Dalam perspektif ekonomi-politik, performa ekonomi lebih ditekankan dibanding idealisme (Golding dan Murdoch, 2001). Karena itu, ketika *Duta* tidak menunjukkan kinerja ekonomi yang bagus dan manajemen dilanda konflik internal, *Jawa Pos* sebagai korporasi induk tidak segan-segan melepas seluruh sahamnya di Duta. Arif Afandi ditarik kembali ke *Jawa Pos*.

Sejak 2002 Duta dikelola Choirul Anam, aktivis NU Jawa Timur yang pernah menjadi wartawan MBM *Tempo*. Anam mendanai *Duta* dan memindah *homebase* dari Jakarta ke Surabaya sampai sekarang. Kebijakan redaksional *Duta* mengalir sesuai dengan alur politik yang diikuti Anam. Duta menjadi ujung tombak komunikasi politik Anam. Ketika pada 2004 Anam ikut mendirikan PKNU (Partai Kebangkitan Nahdhatul Ulama), partai sempalan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Duta diidentikkan dengan kiprah politik PKNU. Secara teoretik, kebijakan redaksional sebuah media tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemiliknya (McChesney, 2015).

Hubungan Anam yang naik turun dengan struktur NU juga memengaruhi pengelolaan *Duta*. Saat ini Duta praktis menjadi milik Anam dan NU sudah tidak mempunyai saham sama sekali. Meski demikian, Anam tetap mempunyai jaringan yang kuat dengan tokoh-tokoh NU, terutama di luar struktur, seperti KH Sholahudin Wahid, adik kandung almarhum Gus Dur, yang masih tetap menjadi figur yang sangat berpengaruh.

Mohammad Kayis, pemimpin redaksi *Duta* menjelaskan bahwa *Duta* adalah surat kabat berbasis pembaca Islam, terutama NU. Meski pun hubungan *Duta* dengan NU secara formal sudah tidak ada, tetapi warga *Nahdhiyyin* tetap menjadi pangsa pasar utama *Duta*. Politik redaksional *Duta* tidak spesifik menerapkan jurnalisme Islam, tetapi spirit Islam tetap mewarnai kebijakan redaksional *Duta* (Kayis, wawancara, Oktober 2019).

Mohammad Khakim, redaktur pelaksana *Duta*, mengatakan, meskipun tidak merumuskan jurnalisme Islam sebagai kebijakan redaksional, tetapi spirit Islam sangat mewarnai kebijakan redaksional

Duta. Ia menyebut prinsip utama dakwah Islam “*Amar Ma’ruf Nahi Munkar*” sebagai spirit utama *Duta*.

Doktrin jurnalisme Islam tidak ditekankan di *Duta*, tetapi dalam berbagai sosialisasi dengan reporter semangat jurnalisme Islam selalu disosialisasikan, sehingga para reporter memahami betul prinsip-prinsip semangat Islam yang diterapkan dalam jurnalisme *Duta*.

Meskipun jurnalisme Islam menjadi spirit dalam menjalankan tugas-tugas redaksional, namun prinsip jurnalisme profesional diterapkan dengan cukup ketat di *Duta*. Kayis mengatakan bahwa sejak seorang reporter direkrut dan kemudian dilatih, prinsip-prinsip jurnalisme profesional diperkenalkan. Materi pelatihan calon reporter meliputi keterampilan jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan prinsip-prinsip profesionalisme seperti keadilan dan keberimbangan (Kayis, wawancara, Oktober 2019).

Khakim menjelaskan (wawancara, Oktober 2019), *Duta* tak menurunkan berita yang mendiskreditkan pihak lain, apalagi berita yang bersifat fitnah. Selain hal itu bertentangan dengan nilai Islam, hal itu juga tidak profesional. Dalam rapat evaluasi harian rutin, hal-hal yang menyangkut profesionalisme selalu menjadi perhatian utama. Jika ada pelanggaran kode etik maupun aturan profesionalisme pimpinan redaksi *Duta* mengambil langkah cepat untuk menyelesaikannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan Pilpres 2019, *Duta* mengakui bahwa kebijakan redaksional adalah mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Pemred Mohamad Kayis mengatakan kebijakan ini diambil dengan pertimbangan profesional. “Kami melihat visi-misi Prabowo-Sandi bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Kayis dalam wawancara dengan peneliti pada Oktober 2019.

Duta menyadari bahwa Pilpres 2019 kental isu-isu identitas, seperti isu PKI, dominasi Cina, dukungan kalangan liberal yang ingin melegalkan LGBT, dan isu-isu sektarian lainnya. “Jika kami menurunkan berita-berita mengenai bahaya laten PKI, misalnya, kami mendukungnya dengan argumen yang profesional, kami melakukan wawancara yang berimbang, dan kami melakukan chech-recheck,” kata Kayis.

Redaktur Pelaksana, Mohamad Khakim, juga menyadari kerasnya persaingan primordial dalam Pilpres. Ia secara personal lebih cocok de-

ngan visi-misi Prabowo-Sandi, karena itu ia mendukung kebijakan redaksional Duta yang pro-Prabowo. Kendati demikian, Khakim mengatakan tetap berupaya berimbang, dengan memperketat konfirmasi dan verifikasi. Khakim juga menerapkan prinsip 5-3 dan 4-2. Artinya, untuk 5 berita yang condong kepada Prabowo akan diimbangi dengan 3 berita yang mendukung Jokowi atau dari 4 berita yang mendukung Prabowo akan diimbangi dengan dua berita pro-Jokowi.

Dalam Pilpres 2019, Choirul Anam pendukung kuat Prabowo-Sandi. Ia bersama K.H Sholahudin Wahid aktif untuk menggalang dukungan kepada Prabowo-Sandi. Anam menjadi pelopor gerakan menentang politisasi NU dengan menolak pencapresan Ma'ruf Amien.

Apakah aktivitas politik Anam memengaruhi kebijakan redaksional *Duta*? Kayis tidak menampik bahwa kiprah politik Anam memengaruhi kebijakan redaksional *Duta*. Meskipun Anam tidak memberikan *briefing* langsung mengenai sikap politiknya, tetapi awak redaksi sudah memahami dengan sendirinya. Hal yang sama disampaikan oleh Khakim. Ia merumuskan kebijakan redaksional yang mendukung Prabowo karena tahu bahwa Anam adalah pendukung Prabowo.

Jurnalisme Profesional dan Politik Identitas: Analisis Harian Bangsa

Harian *Bangsa* lahir pada 2005 sebagai anak perusahaan Jawa Pos Group. Penggagas berdirinya *Bangsa* adalah Mas'ud Adnan, seorang wartawan yang juga aktivis NU sekaligus wakil ketua PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ketika itu. Kelahiran *Bangsa* dipicu oleh lepasnya *Duta Masyarakat* dari Jawa Pos Group beberapa waktu sebelumnya.

Secara politis Mas'ud Adnan berseberangan dengan Choirul Anam yang lebih senior. Anam keluar dari PKB dan mendirikan PKNU (Partai Kebangkitan Nahdhatul Ulama), sementara pada saat itu Mas'ud menjadi wakil ketua PKB Jatim. Dengan menerima proposal Mas'ud untuk mendirikan Harian *Bangsa*, Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos, menyadari bahwa posisinya akan berseberangan dengan *Duta*. Tetapi, mengingat NU adalah pasar yang cukup potensial, maka Dahlan memutuskan untuk menerima proposal Mas'ud.

Mas'ud bertindak sebagai direktur dan redaktur senior. Untuk pemimpin redaksi ditunjuk Abdurrahman Ubaidah, sarjana lulusan IAIN dengan latar belakang Nahdhiyin, tapi tak berada di struktur NU. Duet anak muda Mas'ud Adnan-Abdurrahman Ubaidah berhasil menjadikan *Bangsa* sebagai surat kabar baru yang cukup berpengaruh. Sasaran utama pasar *Bangsa* adalah kalangan Nahdhiyin dan diperluas ke kalangan Islam menengah kota. Kebijakan redaksional lebih mengarah kepada harian umum, meskipun rubrikasi dan semangat dakwah Islam sangat terasa di *Bangsa* (Mas'ud, wawancara, Oktober 2019).

Awak redaksi *Bangsa* seratus persen berlatar belakang Islam. Rata-rata mereka adalah aktivis Ormas Islam atau partai berbasis Islam. Mayoritas dari awak redaksi mempunyai latar belakang Nahdhiyin, baik struktural maupun kultural.

Kebijakan redaksional *Bangsa* lebih diarahkan kepada Islam yang moderat dan tidak sektarian. Spirit Islam yang diusung *Bangsa* adalah spirit *Islam Rahmatan Lilalamin* (Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam). Prinsip Islam paling utama yang diusung dalam kebijakan redaksional *Bangsa* adalah prinsip keadilan, karena Islam mewajibkan umatnya bertindak adil dimana pun dan terhadap siapa pun.

Bangsa tak merumuskan secara spesifik penerapan prinsip jurnalisme Islam. Dalam *briefing* pada wartawan baru diberikan materi “kebangsaan” prinsip-prinsip jurnalisme *Bangsa*. Menurut Abdurrahman Ubaidah, tak ada materi khusus mengenai jurnalisme Islam, tetapi para reporter diberi pemahaman filosofis mengenai prinsip-prinsip keadilan dan keberimbangan (Abdurrahman, wawancara, Oktober 2019).

Menurut Abdurrahman, ciri jurnalisme Islam pada Harian *Bangsa* terlihat pada beberapa rubrikasinya. Salah satu rubrik andalan *Bangsa* adalah “Religia” yang memuat kisah nyata Islami yang inspiratif dari berbagai kalangan. Rubrik ini menjadi rubrik andalan *Bangsa* yang sangat khas dan sangat digemari. Karena itu *Bangsa* mengalokasikan dua halaman penuh untuk rubrik ini.

Selain itu, *Bangsa* juga mempunyai rubrik “Tafsir Aktual” di halaman depan yang diasuh ahli tafsir KH Musta'in Sjafe'i. Rubrik ini menjadi rubrik andalan yang selalu dicari oleh pembaca. Dari berbagai

rubrik yang disajikan terlihat bahwa Bangsa menunjukkan wajah media yang Islami, meskipun tidak secara formal media Islam.

Jurnalisme Profesional

Dalam kaitan dengan jurnalisme profesional, meski secara khusus buku Sembilan Elemen Jurnalisme Kovack tidak pernah dibahas dalam pelatihan jurnalis harian Bangsa, tetapi secara umum prinsip-prinsipnya sering didiskusikan dan sudah dipraktikkan di lingkungan redaksi Bangsa. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme profesional mengenai keseimbangan dan ketidakberpihakan sudah menjadi praktik sehari-hari bagi awak redaksi Bangsa.

Pada masa-masa awal berdirinya *Bangsa*, kantor redaksi berada di gedung Graha Pena milik Jawa Pos. Dan pada saat-saat itu CEO Jawa Pos Dahlan Iskan masih aktif berkantor setiap hari di Graha Pena. Dalam berbagai kesempatan ketika Dahlan mempunyai waktu senggang Mas'ud Adnan dan kawan-kawan menyempatkan diri berdiskusi dengan Dahlan Iskan mengenai nilai-nilai jurnalisme profesional.

Dalam beberapa kesempatan Dahlan juga hadir untuk memberi *briefing*, misalnya pada rapat-rapat tahunan Harian *Bangsa* atau ketika ada momen khusus seperti ulang tahun harian Bangsa. Pada kesempatan itulah internalisasi nilai-nilai jurnalisme profesional *Jawa Pos* ditularkan kepada awak redaksi *Bangsa*.

Pilpres dan Politik Identitas

Harian Bangsa tidak banyak mengalami persoalan internal dalam memberitakan pilpres 2019 dan keberpihakannya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Mas'ud Adnan sebagai pucuk pimpinan tertinggi secara terbuka mengomunikasikan pandangan politiknya kepada awak redaksi. Karena itu, keberpihakan kepada Jokowi terlihat jelas dalam pemberitaan Bangsa edisi pilpres.

Abdurrahman Ubaidah mengakui keberpihakan itu. Ia juga menyadari sepenuhnya bahwa pilpres 2019 adalah pertarungan politik identitas. Kendati demikian, Abdurrahman menegaskan bahwa pilihan politik itu dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip jurnalisme

profesional. Tidak ada dalam pemberitaan Bangsa berita yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Sandi, apalagi berita yang bersifat fitnah.

Mas'ud Adnan menegaskan keberpihakan kepada Jokowi-Ma'ruf diambil berdasarkan kepentingan ideologis dan kepentingan profesional. Secara ideologis, Mas'ud melihat bahwa Jokowi-Ma'ruf lebih bagus dalam visi dan misinya. Ia menekankan kembali prinsip keadilan yang menjadi pijakan keputusan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Mas'ud melihat bahwa serangan sektarian yang menuduh Jokowi PKI dan antek Cina adalah serangan yang tidak adil. Sementara di sisi lain Prabowo diposisikan sebagai pemimpin umat Islam, padahal banyak informasi mengenai kelemahannya dalam menjalankan kewajiban Islam seperti shalat dan jumat. Belum lagi gaya hidupnya yang cenderung kebarat-baratan (Mas'ud, wawancara, Oktober 2019).

Dalam perhelatan pemilihan legislatif 2019 yang lalu Mas'ud Adnan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Apakah politik praktis ini tidak memengaruhi kebijakan redaksional Bangsa? Abdurrahman menjawab, memang Mas'ud Adnan terlihat dalam politik praktis, tetapi ia bisa menjelaskan kepada awak redaksi secara rasional dan profesional. Karena itu, Abdurrahman melihat tidak ada masalah di internal redaksi Bangsa. Semua bisa menerima sikap Mas'ud dan mendukung kebijakan redaksionalnya.

Mas'ud menjelaskan, sebagai wartawan yang juga aktivis politik, ia tidak melihat masalah dengan keterlibatannya dalam dunia politik praktis, sepanjang ia bisa menjustifikasinya secara profesional dan proporsional kepada awak redaksi. Mas'ud menjelaskan bahwa keberpihakannya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf mempunyai benefit positif bagi Bangsa, karena elite-elite politik Jawa Timur, termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa, adalah pendukung Jokowi-Ma'ruf. Jaringan politik yang dibangun Mas'ud pada saatnya juga bisa memberi benefit ekonomi bagi Bangsa.

Simpulan

Pemilihan presiden 2019 kental dengan warna politik identitas. Hal tersebut tercermin pula dalam pemberitaan-pemberitaan di media

massa, termasuk media Islam. Hasil studi ini menunjukkan dua media yang berbasis Islam di Surabaya, Harian Duta Masyarakat dan Harian Bangsa, secara sadar juga ikut bermain dalam isu-isu politik identitas. Bahkan, pemilik kedua media tersebut terlibat dalam politik praktis dengan menjadi calon anggota DPR RI dan terlibat dalam kampanye mendukung Prabowo-Sandi.

Media-media tersebut menerapkan spirit junalisme Islam dalam praktik jurnalisme sehari-hari meskipun tidak secara formal mengadopsinya dalam kebijakan redaksional. Kedua media juga menerapkan standar jurnalisme profesional dalam menjalankan praktik redaksional dalam liputan Pilpres 2019. Kedua media secara sadar memihak pada salah satu pasangan calon, dan menjustifikasi pilihan itu dengan alasan-alasan profesional dan ideologis.

Referensi

- Batubara, L. (2004). *Indonesia Kekurangan Staf Bisnis dan Wartawan*. Makalah dipresentasikan pada diskusi kompetensi wartawan di Jakarta tahun 2004.
- Cresswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry, Research and Design; Choosing among Five Approaches*. London: Sage Publication.
- Denny, J.A.(2019). *Pilpres 2019 dan Politik Identitas*. Diakses dari beritajatim.com
- Hadi, P. (2014). *Jurnalisme Profetik*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Kovach, B., & Rosentiel. (2009). *Elemen Jurnalisme*, Jakarta: Pantau.
- Latif, Y. (2005). *Inteligensia Muslim Dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan.
- Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Politik; Makna, Kekuasaan, dan Transformasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- McChesney, R. (2000). *Rich Media, Poor Democracy*. London: The New Press.
- McQuail, D. (2010). *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L.J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mosco, V. (2009). *Politic Economy of Media*. London: Sage Publication.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Murdock, G., & Golding, J. (2001). *The Political Economy of Media*. London: Bloomsbury.

- Oetama, J. (2001). *Pers Indonesia; Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Gramedia.
- Qodari, M. (2019) *Politik Aliran dalam Demokrasi*. Diakses dari kumparan.com
- Schimmel, A. (2019). *Dan Muhammad adalah Utusan Allah; Penghormatan terhadap Nabi SAW dalam Islam*. Jakarta: Noura Book.
- Simanjuntak, M. (1994). *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta: Grafitti.
- Siradj, A.S. (2019). *Nahdhatul Ulama dan Islam Nusantara*. Diakses dari Tirto.id.
- Steele, J. (2018). *Mediating Islam; Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara*. Jakarta: Bentang.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surjomiharjo, A. (2002). *Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Yin, K.R. (2014). *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo.